

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Adhigama A, *Pidana Mati dan Posisi Indonesia Terhadap Resolusi Majelis Umum PBB dan Resolusi Dewan HAM PBB*, Jakarta: Institute For Criminal Justice Reform
- Umar Anwar, *Penjatuhan Hukuman Mati Bagi Bandar Narkoba Ditinjau Dari Aspek Hak Asasi Manusia*, Divisi Permasiyarakatan Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM, 29 September 2016
- Soerjono Soekanto & Sri Mamudji, 2003, *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat*, PT. Jakarta: Raja Grafindo Persada
- Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*.Cetakan ke-2. Jakarta: Kencana
- I Gusti Ngurah Darwata, *Fakultas Hukum Udayana Denpasar*
- Agung, Ide Anak Agung Gde. Renville. Jakarta: Sinar Harapan, 1983.
- Arba'I, Yon Artiono. *Aku Menolak Hukuman Mati: Telaah Atas Penerapan Pidana Mati*. Jakarta: KPG, 2015.
- Asshiddiqie, Jimly. *Green Constitution: Nuansa Hijau Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945*. Jakarta: Rajawali Pers, 2009.
- Aruro, Pictor. *Hukuman Mati Bagi Pengedar Narkotika Dalam Konteks Uu No. 22 Tahun 1997 Dan Perubahan Uu No. 35 Tahun 2009*. *Lex Administratum*, Vol. IV, No. 3, Maret 2016.
- Lucia Ratih Kusumadewi dan Gracia Asriningsih (eds). *Menolak Hukuman Mati: Perspektif Intelektual Muda*. Yogyakarta: Kanisius, 2015.
- Carey, Peter dan Suhardiyoto Haryadi. *Korupsi dalam Silang Sejarah Indonesia*. Jakarta: Komunitas Bambu, 2016.
- Cribb, Robert Bridson. *Gejolak Revolusi di Jakarta 1945 -1949 Pergulatan Antara Otonomi dan Hegemoni*. Jakarta: Grafiti, 1990.

- Chazawi, Adami. Pelajaran Hukum Pidana Bagian 1 (Stelsel Tindak Pidana, Teori-teori Pemidanaan, & Batas Berlakunya Hukum Pidana. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2002.
- Budiman, Adhigama Andre. Pidana Mati dan Posisi Indonesia terhadap Resolusi Majelis Umum PBB dan Resolusi Dewan HAM PBB. Jakarta: Institute for Criminal Justice Reform (ICJR) dan Human Rights Working Group (HRWG), 2017.
- Husein, Syahrudin. Pidana Mati Menurut Hukum Pidana Indonesia. Medan: USU Digital Library, 2003.
- Indrayana, Denny. Jangan Bunuh KPK. Malang: Intrans Publishing, 2016.
- Indrati S, Maria Farida. Ilmu Perundang-Undangan: Proses dan Teknik Pembentukannya. Yogyakarta: Kanisius, 2007.
- Laporan Penelitian Dosen. Jenis-jenis Tindak Pidana Militer di Magelang. Magelang: Universitas Muhammadiyah Magelang, 2014.
- Latif, Yudi. Negara Paripurna: Historisitas, Rasionalitas, dan Aktualitas Pancasila. Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, Cetakan Ketiga, 2011.
- Lawther, Cheryl, Luke Moffett and Dov Jacobs (ed.). Research Handbook on Transitional Justice. Cheltenham: Edward Elgar Publishing Limited, 2017.
- Radie, Teuku Mohamad. Pembaruan dan Politik Hukum dalam Rangka Pembangunan Nasional. Prisma No. 6 Tahun ke II, Desember 1973.
- Ramírez-Barat, Clara (ed.). Transitional Justice, Culture, and Society: Beyond Outreach. New York: Social Science Research Council, 2014.
- Robet, Robertus. Politik Hak Asasi Manusia dan Transisi di Indonesia: Dari Awal Reformasi hingga Akhir Pemerintahan SBY. Jakarta: ELSAM, 2014.
- Saleh, Roeslan. Masalah Pidana Mati, Jakarta: Aksara Baru, Cetakan Kedua, 1978.
- Salmi, Akhilar. Eksistensi Hukuman Mati. Jakarta: Aksara Persada Press, 1985.
- Sasangka, Hari. Narkotika dan Psicotropika dalam Hukum Pidana Bandung: Mandar Maju, 2003.

- Sastrawidjaja, Sofjan. Hukum Pidana Asas Hukum sampai dengan Alasan Peniadaan Pidana. Bandung: Armico, 1995.
- Sujono, AR dan Boy Daniel. Komentar & Pembahasan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Jakarta: Sinar Grafika, 2011.
- Supomo dan Djokosutono. Sejarah politik Hukum Adat. Jakarta: Pradnja Paramitha, 1982.
- Sastrawidjaja, Sofjan. Hukum Pidana Asas Hukum sampai dengan Alasan Peniadaan Pidana. Bandung: Armico, 1995.
- Wilson. Warisan Sejarah Bernama Hukuman Mati, dalam Politik Hukuman Mati di Indonesia. Jakarta: Marjin Kiri dan P2D, 2016.

B. Jurnal

- Amnesty Internasional. Vonis Hukuman Mati dan Eksekusi 2013. London: Amnesty International Publication, 2014.
- Amnesty International Global Report: Death Sentences and Executions 2015. London: Amnesty Internasional Ltd, 2016.
- Vonis Hukuman Mati dan Eksekusi 2013. London: Amnesty International Publication, 2014.
- Aruro, Pictor. Hukuman Mati Bagi Pengekar Narkotika Dalam Konteks Undang-Undang No. 22 Tahun 1997 Dan Perubahan Undang-Undang No. 35 Tahun 2009. Lex Administratum, Vol. IV, No. 3, Maret 2016.
- Muhammad, Rusli. Reformasi Kekuasaan Kehakiman: Studi Sinkronisasi UUD dan UU No 14 Tahun 1970. Jurnal Hukum dan Keadilan, Vol. 1, No 1, 1998

C. Peraturan Perundang-Undangan

- Undang-Undang Dasar 1945
- Undang-Undang 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia
- Resolusi Majelis Umum PBB
- Undang-Undang 35 Tahun 2009 tentang narkoba
- Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia No VI/MPR/1973.
- Majelis Umum PBB. Universal Declaration of Human Rights. 217 A (III). 10 December 1948.

D. Internet

- Arman Dhani, Meragukan Hukuman Mati, Geotimes, <<https://geotimes.co.id/meragukan-hukuman-mati/>>, diakses 1 Oktober 2017.
- Bonnie Triyana, Korupsi, Historia, 25 Maret 2017, <<http://historia.id/kolom/korupsi>>, diakses 1 Oktober 2017.
- AlwiShahab, <<https://alwishahab.wordpress.com/2009/12/02/hukuman-gantung-di-alun-alun-2/>>, diakses pada 10 September 2017.
- Feri Kisihandi, Penetapan Hukuman Mati Punya Alasan Kuat, Republika, 17 Februari 2015, <<http://www.republika.co.id/berita/koran/halaman-1/15/02/17/njwnx95-penetapan-hukuman-mati-punya-alasan-kuat>>, diakses pada 13 Desember 2017.
- Hendri F. Isnaeni, Keadaan Darurat Korupsi, Historia, 27 September 2012, <<http://historia.id/modern/keadaan-darurat-korupsi>>, diakses 1 Oktober 2017.
- Ihsanuddin, Jokowi Tanda Tangani Perppu yang Atur Hukuman Kebiri, Kompas, 25 Mei 2016, <<http://nasional.kompas.com/read/2016/05/25/17001251/jokowi.tanda.tangani.perppu.yang.atur.hukuman.kebiri>>, diakses pada 20 September 2017.

